

ABSTRAK

Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan peran tersebut yang meliputi pemberian izin, fasilitator, maupun pemberi rekomendasi, serta ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program Jaminan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dalam Pelaksanaan BPJS Kesehatan menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan hambatan-hambatan yang muncul serta solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, sehingga metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori peran dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Blora dalam Pelaksanaan BPJS Kesehatan menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah sebagai regulator, pelaksana dan pemberi dana. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora adalah adanya kenaikan iuran BPJS namun kemudian diputus MA tidak ada kenaikan iuran, adanya fasilitas kesehatan yang tidak bisa melayani peserta BPJS Kesehatan karena belum terakreditasi solusinya adalah fasilitas kesehatan yang bersangkutan mengajukan perpanjangan akreditasi ke KARS, peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan BPJS belum maksimal solusinya adalah perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk penguatan peran Dinas Kesehatan sebagai regulator.

Kata kunci : peran, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan

ABSTRACT

The regional government through the Health Office is the backbone of the implementation of the national strategic program, including the JKN-KIS Program. In various laws and regulations the role includes the granting of permits, facilitators, as well as providing recommendations, as well as the availability of health facilities and the provision of health services for the implementation of the Health Insurance program. This study aims to determine the role of the Blora District Health Office in the Implementation of the Health BPJS according to Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System to improve health services to the public and the obstacles that arise as well as their solutions.

The method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used in the form of primary data and secondary data, so that the method of data collection through field studies and literature studies. Data analysis method used is qualitative analysis. As a knife of analysis, role theory and legal certainty theory are used.

The results showed that the role of the Blora District Health Office in the Implementation of the Health BPJS according to Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System to improve health services to the community was as a regulator, implementer and funder. The obstacles that arise in the implementation of the Health BPJS in Blora Regency are an increase in BPJS contributions but then the Supreme Court decides there is no increase in fees, there are health facilities that cannot serve BJPS Health participants because the health facility has not been accredited. , the role of the Health Service in implementing BPJS is not yet the maximum solution is the need for legislation to strengthen the role of the Health Service as a regulator.

Keywords: role, Health Office, Health BPJS